



Judul : Pembagian Pimpinan Parlemen Tuntas Tiga Hari
Tanggal : Jumat, 04 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Pembagian Pimpinan Parlemen Tuntas Tiga Hari

Penetapan pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode 2024-2029 yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya membagi kekuasaan secara merata di parlemen.

JAKARTA, KOMPAS — Pembagian kursi pimpinan parlemen, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat, tuntas dilakukakan dalam tiga hari. Proses yang terjadi menunjukkan adanya upaya pembagian kekuasaan jabatan dibagikan setara sesuai dengan negosiasi politik.

Pemilihan dan penetapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi (3/10/2024), menutup pengisian kursi pimpinan tiga lembaga di parlemen.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling awal ditetapkan, hanya beberapa jam setelah 580 anggota lembaga legislatif itu dilantik pada 1 Oktober. Tanpa gejolak, Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pemilik kursi terbanyak di DPR, ditetapkan kembali sebagai Ketua DPR. Semua fraksi menyepakati ketentuan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD yang mengatur pemilihan DPR berasal dari partai peraih kursi terbanyak di DPR.

Pimpinan DPD ditetapkan sehari kemudian, 2 Oktober dini hari. Meski sempat terjadi dinamika, DPD menetapkan Sultan Najamudin sebagai ketua lembaga itu untuk lima tahun ke depan. Anggota DPD dari Bengkulu itu unggul dari pesaingnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang meruakan Ketua DPR periode 2019-2024.

Pemilihan pimpinan MPR juga relatif mulus meski harus menunggu DPD memutuskan siapa yang akan diusulkan sebagai calon pimpinan MPR. Hal ini karena delapan partai sudah lebih dulu menyepakati komposisi pimpinan MPR.

Pala Kantisik, Ahmad Muzani ditetapkan sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Sedangkan Faridhan MPR itu juga menetapkan delapan wakil ketua MPR, tujuh dari partai dan satu dari kelompok DPD.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Faharjo Jati, menyampaikan pemilihan dan penetapan pimpinan parlemen yang relatif cepat memperlihatkan adanya upaya pembagian kekuasaan. Semua "kur" jabatan dibagikan setara sesuai dengan negosiasi politik.

"Cepatnya proses ini memperlihatkan upaya pembagian kekuasaan setara antarpartai pemilik kursi, baik di DPR maupun MPR," katanya.

Meskipun demikian, Wasisto juga menilai fenomena serba kilat penentuan pimpinan parlemen akan berdampak positif bagi pelaksanaan fungsi kontrol lembaga legislatif. Kekuasaan yang dipegang partai-partai politik relatif setara. Oleh karena itu kehidupan demokrasi parlemen diyakini dapat tetap terjaga.

Rangkul semua elemen

Muzani, dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Ketua MPR, menyampaikan komitmen untuk merangkul semua elemen di MPR, baik partai politik maupun kelompok DPD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini memutarakan kritik terhadap pimpinan harus dilakukan jika terbukti melakukan kesalahan dalam memberikan keputusan.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga mengingatkan terkait agenda MPR terdekat, yaitu pemilihan presiden untuk periode terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober. Pergantian pemerintahan merupakan babak Indonesia telah melangkah maju dalam aspek demokrasi.

"Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang berorientasi kebangsaan yang memuliskan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan," katanya.

Tak lupa, Muzani mengingatkan bahwa tugas pimpinan MPR beserta semua anggotanya tidak ringan. Karena itu, semua harus menjaga kepercayaan rakyat.

Alat kelengkapan

Setelah kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD lengkap, ketiga lembaga itu akan melanjutkan dengan pembentukan dan pengisian pimpinan alat kelengkapan MPR, misalnya, badan

penganggaran, badan sosialisasi, dan badan lainnya. Adapun DPD akan membentuk dan mengisi pimpinan sejumlah komite.

Begitu pula DPR yang akan membentuk alat kelengkapan, seperti komisi, badan anggaran, badan legislatif, dan badan urusan rumah tangga.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, alat kelengkapan DPR (AKL) akan ditetapkan sebelum kabinet Prabowo terbentuk. AKL, baik komisi maupun badan, sebisa mungkin menyesuaikan pos-pos kementerian dan lembaga di pemerintahan nanti.

"Insya Allah (AKL) akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan. Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya, sudah sudah ada terdapat bagaimana rencana presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang," ujarnya.

Terkait pembentukan alat komisi yang akan cilobur untuk menyuarakan dengan jumlah kementerian di kabinet, Puan menyebut hal itu masih dibahas DPR. Ia juga belum bisa memastikan apakah pembentukan AKL baru menyusul kemunculan penunjukan kementerian di kabinet Prabowo.

"Insya Allah kami akan membangun dan bicarakan bersama. Jumlah AKL belum ada," ujarnya.

Pembentukan AKL kali ini lebih lambat sebagai imbas dari revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara. Revisi UU itu mengubah jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 24 kementerian, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

Inspilasi dari perubahan regulasi itu adalah perubahan AKL utamanya komisi di DPR harus sesuai jumlah kementerian di kabinet presiden terpilih kelak. Jumlah AKL harus disesuaikan dengan kementerian karena terkait fungsi pengawasan, anggaran, dan legislatif yang dijalankan oleh AKL dan DPR.

Tetap bekerja

Meski AKL belum akan dibentuk dalam waktu dekat, Puan memastikan para anggota DPR 2024-2029 tetap bekerja.

Misalnya, konsolidasi internal fraksi-fraksi partai politik di DPR termasuk penentuan pimpinan fraksi. Dengan anggota baru di periode DPR saat ini yang mencapai 47 persen, fraksi-fraksi pun akan banyak melakukan pertemuan, misalnya untuk memberikan sosialisasi.

"Mereka harus lebih memahami seperti apa DPR, mereka juga harus bertemu, masih banyak lagi pertemuan terkait apa itu DPR dan sebagainya. Kemudian konsolidasi fraksi."



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Ini kan, waktunya hanya seminggu sebelum penetapan komisi-komisi dan penetapan AKD-AKD," katanya.

Puan juga memastikan para anggota DPR periode 2024-2029 tetap akan ber Kantor sekalipun belum ada penetapan AKD. "Mereka pasti akan datang ke Kantor bertemu dengan pimpinan fraksi yang sudah ditentukan," ujarnya.

(BOW/DTAWIL)

